

# Bab I

## Informasi Umum

### 1.1 Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Renstra BPPP Ambon.

Proses evaluasi perencanaan pembangunan merupakan suatu proses evaluasi yang secara berkesinambungan dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan sistem perencanaan pada tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020 – 2024 perlu dievaluasi untuk merespon dinamika perubahan kebijakan dan lingkungan strategis yang terjadi di lingkup nasional, kementerian atau sub-sektor perikanan. Proses evaluasi perencanaan tersebut mulai dilakukan pada tahun 2021.

Dalam rangka penyelarasan program Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan pada tanggal 07 Juni 2021 Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor SK.1253/BPPP/RC/VI/2021 tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020 – 2024 sebagai perubahan atas Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor SK.1168/BPPP/RC.221/VII/2020 tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2020 – 2024.

Arah kebijakan pada Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020 – 2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BRSDM 2021 untuk mendukung perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan nasional melalui penyediaan SDM kompeten (Visi 1) dan mewujudkan pelaku utama mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian keberlanjutan sumber daya KP (Visi 8) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM yang kompeten serta memberikan dampak pada peningkatan ekonomi melalui 3 (tiga) Prioritas KKP tahun 2021 – 2024 sebagai langkah terobosan dalam pelaksanaan program yaitu (1) Penerapan kegiatan penangkapan ikan terukur disetiap WPP untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan juga peningkatan PNPB sebagai kontribusi peningkatan ekonomi kepada negara (2) Pengembangan Budidaya Berbasis Ekspor dimana terdapat 4 komoditas perikanan budidaya yang merupakan komoditas unggulan di pasar global yaitu udang, lobster,

kepiting dan rumput laut, serta (3) Pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Reviu kinerja dilakukan sebagai tindaklanjut rekomendasi Inspektorat III, Itjen KKP pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BRSDM yang disampaikan dalam Nota Dinas nomor 7142/BRSDM.1.RC.210/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021, bahwa BRSDM perlu melakukan revisi RENSTRA BRSDM KP tahun 2020 – 2024 untuk merubah target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran/ per IKU (biaya output/ outcome) dan Indikator Kinerja Terbaru. Selanjutnya berdasarkan surat dari Sekretariat nomor B.1951/BRSDM.1/RC.510/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Hasil Reviu Kinerja Lingkup BRSDM Triwulan I Tahun 2022, saran tindak lanjut salah satunya adalah perubahan pada dokumen perencanaan kinerja (PK) perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian terhadap lampiran renstra, manual IKU dan dokumen rencana aksi dengan disertai justifikasi atas perubahan PK.

Reviu Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses evaluasi yang senantiasa dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan yang didalam konsepnya disebut sebagai evaluasi *on-going* atau proses evaluasi pada periode perencanaan tahun berjalan. Jenis evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formulasi yang menelaah sejauh mana formulasi desain kebijakan, program, dan kegiatan telah menggunakan metode yang benar berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional. Reviu terhadap Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020-2024 dilakukan sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap target-target kinerja yang berubah mengikuti kebijakan yang ada di BRSDM.

Namun demikian ada satu kaidah khusus yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Rencana Strategis K/L sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 bahwa setiap K/L sangat diharapkan untuk tidak melakukan perubahan Renstra K/L yang telah ditetapkan. Perubahan atau revisi Renstra K/L berjalan dapat dilakukan sepanjang: a) Terdapat UU yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau b) Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L; c) Perubahan Renstra K/L tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

## 1.2 Dasar Hukum Reviu

Dasar hukum pelaksanaan Reviu Renstra BPPP Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2019, tentang pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995 (Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, 1995);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan,
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2011, tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan,
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/Per-BRSKM/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSKM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

- l. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) III dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2020;
- m. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 tanggal 1 Oktober 2021;
- n. Nota Dinas dari Sekretariat Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5105/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada BRSDMKP;
- o. Nota Dinas dari BRSDM Nomor 7142/BRSDM.1/RC.210/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Justifikasi Usulan Pemutahiran PN dan MP BRSDM KP pada Renja 2021 pasca refocusing dan realokasi belanja KKP Tahap IV;
- p. Surat Sekretariat BRSDM Nomor B.1951/BRSDM.1/RC.510/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Hasil Reviu Kinerja Lingkup BRSDM Triwulan I Tahun 2022.

### **1.3 Tujuan Reviu**

Tujuan dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPPP Ambon Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menelaah konsistensi dan relevansi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020 - 2024 terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Untuk melakukan penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon Tahun 2020 - 2024 terhadap perubahan dinamika kebijakan dan lingkungan strategis pada lingkup nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BRSDM KP.

### **1.4 Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup atas Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPPP Ambon Tahun 2020 - 2024 adalah pada Bab IV, mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPPP Ambon, meliputi:

- a. Capaian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020 dan 2021;
- b. Perubahan Indikator Kinerja BRSDM Tahun 2021 dan 2022;

- c. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Tahun 2021 dan 2022.

# Bab II

## Uraian Hasil Reviu

### 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Ambon Tahun 2020 - 2021

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). BPPP Ambon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan 4 (empat) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (Lima belas) indikator kinerja sebagaimana dalam Renstra BPPP Ambon Nomor Nomor SK.1253/BPPP/RC/VI/2021 tentang Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon 2020 – 2024. Rincian capaian kinerja Puslatluh KP sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Refleksi Capaian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2020 – 2021

NO	IKU	SATUAN	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	kelompok	-	-	-	35	38	108,57
2	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	kelompok	39	240	615,38	-	-	-
3	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	Kelompok	-	-	-	100	130	130
4	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	Kelompok	97	136	140,2	-	-	-
5	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek	Paket	1	2	200	1	1	100
6	Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	61,63	102,72	60	61,74	102,87
7	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	5	5	100	5	5	100
8	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	-	-	-	1	1	100,00

NO	IKU	SATUAN	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
9	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	-	-	-	1	1	100,00
10	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh	Kelompok	2.518	2.686	106,67	2.518	2.641	104,88
11	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Produk	1	1	100	1	1	100,00
12	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Orang	1.165	1.165	100	1.393	1.393	100
13	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training"	Paket	-	-	-	20	20	200
14	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	Paket	-	-	-	4	4	100
15	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	1	1	100,00	1	1	100,00
16	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	%	-	-	-	100	100	100,00
17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP	Nilai	-	-	-	87	97,24	111,77
18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP	%	82	100	121,95	84	100	119,05
19	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP	Indeks	72	76,28	105,94	73	77,18	105,73
20	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh	%	1	0,01	100	≤1	≤1	100
21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puslatluh (nilai)	Nilai	Baik (88)	92,83	105,49	89	97,44	109,48
22	Nilai Kinerja Anggaran Puslatluh (Nilai)	Nilai	85	92,03	108,27	86	85,58	99,43

## 2.2 Perubahan Rencana Kerja BPPP Ambon KP Tahun 2021

Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2021. Diharapkan Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Pada Tahun 2021, Perjanjian Kinerja BPPP Ambon, telah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali perubahan, sebagai berikut :

1. Pada bulan Juni 2021, dilakukan revisi ke-1. Dasar revisi PK adalah menindaklanjuti terbitnya Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) Dirjen Anggaran Kemenkeu No. S-351/AG/AG.3/2021 tanggal 2 juni 2021 terkait Revisi Penghematan Anggaran Tunjangan Kinerja Satker BRSDM Tahun 2021, dengan perubahan anggaran semula Rp. 50.366.238.000,- menjadi Rp. 49.318.783.000,-
2. Pada bulan September 2021, dilakukan revisi ke-2. Dasar revisi PK adalah Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 1780/SJ.1/TU.140/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, perihal Perubahan Dokumen PK Level 1 Tahun 2021 Lingkup KKP Pasca Refocusing, untuk dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja lingkup Satker BRSDM pasca refocusing anggaran, dengan perubahan anggaran semula Rp. 49.318.783.000,- menjadi Rp. 47.733.882.000,- dan satuan target pada IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan BPPP Ambon dari semula 100% menjadi <1 %.
3. Pada bulan Desember 2021, dilakukan revisi ke-3. Dasar revisi PK adalah Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 2414/SJ.1/RC.210/XI/2021 terkait Pemutakhiran Renja Pasca Refocusing dan Realokasi Belanja KKP Tahap IV Tahun 2021 sekaligus mengakomodir perubahan target yang berkaitan dengan revisi pergeseran anggaran antar Satker lingkup BRSDMKP. Dengan perubahan anggaran semula Rp. 47.733.882.000,- menjadi Rp. 47.702.536.000,-

Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor SK.1253/BPPP/RC/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021. Dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah dokumen Usulan Perubahan Rencana kerja KKP TA.2021



Pasca Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV melalui surat Sekretariat Jenderal KKP nomor B.2702/SJ.1/RC.210/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Hasil reuiu atas Revisi Rencana Strategis BPPP Ambon tersaji pada tabel 2.

**Tabel 2. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPP Ambon KP Tahun 2021**

NO	IKU	SATUAN	Tahun 2021		
			Renstra	PK	Keterangan
<b>SK 1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP</b>					
1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	kelompok	35	35	
2	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	Kelompok	100	100	
<b>SK 2. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat</b>					
3	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek	Paket	1	1	
4	Persentase Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%	60	60	
5	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan)	orang	10	5	Pengurangan target disebabkan refocusing anggaran pada pelatihan masyarakat, sehingga akan mempengaruhi outcome
<b>SK 3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar</b>					
6	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	1	1	
7	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	Unit	1	1	
<b>SK 4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>					
8	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh	Kelompok	2.518	2.518	
9	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Produk	1	1	
<b>SK 5. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan</b>					
10	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	Orang	2.893	1.393	Pengurangan target disebabkan

NO	IKU	SATUAN	Tahun 2021		
			Renstra	PK	Keterangan
					refocusing anggaran pada pelatihan masyarakat, sehingga akan mempengaruhi outcome
11	Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis "Full Online Training"	Paket	20	20	
12	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya	Paket	4	4	
13	Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan dan Penyuluhan sesuai standar lembaga pelatihan	Lembaga	1	1	
<b>SK 6. Tatakelola pemerintahan yang baik</b>					
14	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP	%	100	100	
15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP	Nilai	80	87	Penyesuaian target untuk menghindari KPI gaming
16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Puslatluh KP	%	84	84	
17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP	Indeks	73	73	
18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Puslatluh KP	%	100	-	Penyesuaian nomenklatur IKU untuk memudahkan dalam pengukuran
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2020 (%)	%	-	≤1	

### 2.3 Perubahan Rencana Kerja BPPP Ambon KP Tahun 2022

Reviu terhadap target kinerja yang tercantum pada Bab IV Dokumen Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Nomor SK.1253/BPPP/RC/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021. Dasar perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 tahun 2021 tentang Rencana kerja KKP tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP, capaian IKU tahun 2021 dan usulan pemutahiran lingkup BRSDM KP.

Beberapa indikator yang disesuaikan volume targetnya antara lain:

- a. IKU “Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis *"Full Online Training"* dihilangkan karena sudah tergabung dalam IKU Masyarakat yang dilatih;
- b. Perubahan target indikator “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP” dari target 80 menjadi 92 menyesuaikan dengan realisasi tahun tahun sebelumnya;
- c. Perubahan target indikator “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP” dari 74 menjadi 76.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP, maka ada arahan untuk mencantumkan beberapa IKU tambahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 meliputi antara lain:

- a. Nilai PNBP dengan target 0,405 Milyar;
- b. Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan target 550 orang;
- c. Unit kerja BPPP Ambon yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hasil revidi atas Revisi Rencana Strategis Puslatluh KP 2022 tersaji pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Puslatluh KP Per Mei 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	Tahun 2022		
				Renstra	PK	Keterangan
<b>Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP</b>						
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)	65	65	
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)	2.719	2.719	
			Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat Berbasis <i>"Full Online Training"</i>	100	-	Dihilangkan, sudah digabung dengan IKU Masyarakat dilatih
		3	Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar)	-	0,405	Penambahan IKU Baru

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	Tahun 2022		
				Renstra	PK	Keterangan
2	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	4	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (orang)	12	12	
		5	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya (paket)	2	2	
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok)	2.941	2.941	
		7	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	67	67	
		8	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	215	215	
		9	Tenaga kerja yang terlibat lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (orang)	-	550	Penambahan IKU Baru
4	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	10	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek (Paket)	1	1	
		11	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan (produk)	1	1	
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	1	1	
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)	1	1	
<b>Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM</b>						
6	SK. 8 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (%)	100	100	
		15	Unit Kerja lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	-	1	Penambahan IKU Baru
		16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pelatihan dan Penyuluhan KP (Nilai)	80	92	Penyesuaian target IKU dengan Realisasi Tahun 2021
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan	86	86	

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	Tahun 2022		
				Renstra	PK	Keterangan
			yang terstandar lingkup Puslatluh KP (%)			
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Puslatluh KP (indeks)	74	76	Penyesuaian target IKU dengan Realisasi Tahun 2021
		19	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2021 (%)	-	≤1	Penyesuaian nomenklatur IKU untuk memudahkan dalam pengukuran
			Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Puslatluh dibandingkan realisasi anggaran Puslatluh TA. 2021 (%)	100	-	
		20	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja lingkup Puslatluh KP (%)	70	70	
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon	89	89	
		22	Nilai Anggaran BPPP Ambon	86	86	

# Bab III

## Penutup

Seluruh perubahan pada revidi atas Revisi Rencana Strategis BPPP Ambon Tahun 2021-2022 ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Rencana Strategis BPPP Ambon Tahun 2020-2024 agar dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkup BPPP Ambon dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020 – 2024.

Jakarta, Mei 2022

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon



Abubakar